# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia periode tahun 2014-2025, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan, variabel Upah Minimum Provinsi ($X_1$), Pertumbuhan Ekonomi ($X_2$), dan Indeks Pembangunan Manusia ($X_3$) berpengaruh signifikan terhadap Kesempatan Kerja (Y) di Indonesia. Dengan koefisien determinasi sebesar 0.7612 maka variabel Kesempatan Kerja (Y) dapat di jelaskan oleh variable Upah Minimum Provinsi ($X_1$), Pertumbuhan Ekonomi ($X_2$), dan Indeks Pembangunan Manusia ($X_3$) dapat dijelaskan sebesar 76.12%. Hal ini ditunjukkan oleh interaksi dinamis ketiga variabel makro tersebut, khususnya saat menghadapi guncangan ekonomi eksternal seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana perubahan pada ketiga dimensi ini secara bersama-sama menentukan ketahanan pasar kerja dan kemampuan penyerapan tenaga kerja nasional.

2. Secara parsial, Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dengan pola interaksi yang kompleks dengan koefisien regresi sebesar 0.0883873. Di satu sisi, kenaikan UMP yang konsisten setiap tahunnya ditujukan sebagai jaring pengaman sosial untuk meningkatkan daya beli pekerja. Namun di sisi lain, jika kenaikan upah riil tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas, maka kebijakan ini berpotensi menjadi disinsentif bagi sektor formal

(khususnya industri padat karya) yang meresponsnya dengan pembatasan rekrutmen tenaga kerja baru.

3. Secara parsial, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Indonesia, namun mengalami tantangan berupa gejala *jobless growth* (pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja yang proporsional). Meskipun pertumbuhan ekonomi sempat pulih pasca-pandemi, elastisitas penyerapan tenaga kerjanya cenderung menurun karena pertumbuhan lebih banyak didorong oleh sektor padat modal (*capital intensive*) dan berbasis teknologi, dibandingkan sektor padat karya (*labor intensive*).

4. Secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja, tetapi masih dihadapkan pada masalah *mismatch* (ketidaksesuaian) keterampilan. Walaupun kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan) terus mengalami peningkatan tren positif secara konsisten di seluruh provinsi, peningkatan ini belum sepenuhnya mampu menurunkan angka pengangguran secara drastis akibat kesenjangan antara kualifikasi lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi riil yang dibutuhkan oleh pasar kerja formal.

**5.2 Saran**

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa langkah kebijakan praktis sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bersama Dewan Pengupahan disarankan untuk merumuskan kebijakan penetapan UMP secara lebih fleksibel dan adil. Kenaikan UMP sebaiknya tidak hanya didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro semata, melainkan juga harus secara riil diintegrasikan dengan indikator produktivitas tenaga

kerja di masing-masing sektor regional agar tidak membebani kelangsungan usaha industri padat karya.

2. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada kuantitas pertumbuhan PDB/PDRB, melainkan pada kualitas pertumbuhan tersebut. Perlu diberikan stimulus khusus, insentif pajak, kemudahan regulasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis non-primer yang bersifat padat karya (seperti pertanian modern, pariwisata, dan UMKM) guna memperluas kapasitas penyerapan angkatan kerja nasional yang terus bertambah.

3. Guna memaksimalkan dampak positif kenaikan IPM terhadap penyerapan kerja, Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Ketenagakerjaan perlu mempererat integrasi kurikulum pendidikan (terutama vokasi/kejuruan) dengan kebutuhan dunia industri (*link and match*). Standardisasi sertifikasi kompetensi kerja juga perlu terus digalakkan agar lulusan baru memiliki daya saing tinggi yang siap diserap pasar kerja.

4. Mengingat tingginya disparitas IPM dan kesempatan kerja antara wilayah Indonesia bagian Barat (khususnya Pulau Jawa) dengan wilayah Indonesia bagian Timur (seperti NTT dan Papua), pemerintah disarankan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan manusia secara asimetris. Prioritas investasi kesehatan dan fasilitas pendidikan bermutu tinggi harus dialihkan ke daerah-daerah dengan IPM rendah guna menyetarakan produktivitas tenaga kerja lokal secara nasional.